

Pelanggaran	Konsumen	Pertanahan	Demiliterisasi
Eko-Global	Perempuan	Lingkungan	Mafia Perad.
DKI Jakarta	Pemukiman	Ms. Miskin Kota	

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for Disappearances and Victims of Violence

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	2000	2001	2002	2003	2004														
Kompas	Med In	Republika	Suara Pb	War Kot	Pos Kota	Sr Karya	Ry Mer	Bisnis In	Jkt Post	Pkr Ry																				

Pemeriksaan terhadap Wiranto dan Roesmanhadi dalam kapasitas sebagai saksi kasus TSS.

KPP HAM akan Periksa Wiranto

JAKARTA—Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Trisakti, Semarang I dan Semarang II (TSS), Selasa ini (5/3) menugus kehadiran mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto dan mantan kapolri Jenderal (Purn) Roesmanhadi. Keduanya direncanakan akan menjalani pemeriksaan dalam kasus TSS.

“Pemeriksaan terhadap Pak Wiranto, kami jadwalkan mulai pukul 10.00 dan berakhir sekitar pukul 13.00 WIB,” tandas Albert Hasi-buan, Ketua KPP TSS pada *Republika* kemarin (4/3) di Jakarta.

Setelah itu menurut Albert, pemeriksaan terhadap Roesmanhadi akan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. “Pemeriksaan akan dilaku-

kan oleh anggota KPP dan tim asistensi,” tandasnya. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Wiranto dan Roesmanhadi dalam kapasitas sebagai saksi untuk kasus pelanggaran TSS tersebut.

Lebih lanjut Albert mengungkap bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan pada keduanya serta 16 petinggi TNI/Polri seputar keterlibatan yang bersangkutan, beban tanggung jawab serta konfirmasi sekaligus koreksi terhadap keterangan saksi-saksi sebelumnya. Namun demikian menurut Albert, sampai kemarin petang (4/3), KPP belum menerima surat pernyataan kesediaan atau penolakan dari kedua mantan petinggi TNI/Polri itu.

“Yang ada justru tanggapan dari institusi TNI, yaitu dari Kababin-kum Mayjen TNI Timor P Manurung yang menyatakan bahwa para petinggi TNI tak akan memenuhi panggilan KPP TSS karena diang-gap tak sah,” tandas Albert.

Di tempat terpisah puluhan mahasiswa yang tergabung dalam So-lidartas Aksi Mahasiswa Indonesia (SAMI) melakukan aksi demo menuntut pembekuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di gerbang gedung DPR-MPR. “Bekukan Komnas HAM se-karang juga,” teriak mereka yang mengaku berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, Bina Sarana Indonesia dan STIE Ahmad Dah-lan.

Juru Bicara SAMI, Azmi Hidayati menyatakan, Komnas HAM perlu dibekukan karena telah digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk kepentingan inter-nasional. Itu dapat dilihat dalam sikap Komnas yang tidak adil atau memilih-milih dalam menangani kasus HAM. “Kasus Ambon, kasus Poso, tidak pernah disuarakan se-cara keras oleh Komnas HAM. Se-balikny, kasus Trisakti dan Se-manggi yang tidak berskala luas justru dipertanyakan dengan *ngotot*,” tutur Azmi.

SAMI juga menuding Komnas HAM kerap mempolitisasi kasus HAM dan hanya menangani kasus-kasus HAM yang dapat mendorong kucuran dana dari luar negeri. Organisasi solidaritas itu juga menolak KPP HAM TSS bentukan Komnas HAM. Alasannya KPP HAM TSS bertentangan dengan undang-undang dan tidak obyektif dalam bertindak.

Azmi menyatakan bahwa pihak-nya setuju kasus TSS ditangani se-cara hukum. “Tidak ada yang kebal hukum, termasuk TNI/Polri,” ung-kapnya.

Azmi menyatakan bahwa proses

hukum terhadap kasus TSS telah dilakukan sesuai rekomendasi Pan-sus DPR. Penilaian DPR, kasus TSS merupakan pelanggaran biasa, bukan pelanggaran HAM berat. Karena itu, SAMI menuding Kom-nas HAM telah melakukan kebo-hongan publik dengan menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus TSS sehingga perlu dibekukan.

Dalam aksi itu, para pendemo mengusung sejumlah spanduk dan poster, antara lain bertuliskan ‘KPP HAM Melakukan Kebohong-an’ dan ‘Bekukan Komnas HAM. Komnas HAM telah memperpa-jiang masa kerja KPP HAM TSS se-lama satu bulan dan untuk me-lengkapi laporannya.

Keanggotaan Komnas HAM me-mang sekarang sedang dibahas di Komisi II DPR. Itu karena keang-gotaan Komnas HAM telah kadalu-arsa sejak September tahun lalu.

TES